



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202003597, 27 Januari 2020

Pencipta

Nama : **SITI MARYAM MUNJIAT**
Alamat : Blok Cibogo RT 001 RW 003 Desa Warujaya Kecamatan Depok
Kabupaten Cirebon, Cirebon, Jawa Barat, 45653
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **SITI MARYAM MUNJIAT**
Alamat : Blok Cibogo RT 001 RW 003 Desa Warujaya Kecamatan Depok
Kabupaten Cirebon, Cirebon, Jawa Barat, 45653
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**
Judul Ciptaan : **PENERAPAN KITAB TA'LIM AI-MUTA'ALLIM: TA'DHIIMUL 'ILMI
WA AHLIHI TERHADAP PERILAKU SISWA SMK TARA DEPOK
CIREBON**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 27 Januari 2020, di CIREBON

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000176916

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

**NASKAH AKADEMIK
HASIL PENELITIAN**

**“PENERAPAN KITAB TA’LIM AL-MUTA’ALLIM: *TA’DHIIMUL ‘ILMI WA AHLIHI*
TERHADAP PERILAKU SISWA SMK TARA DEPOK CIREBON”**



Peneliti:

Siti Maryam Munjiat, S.S., M.Pd.I.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesuksesan nilai pendidikan salah satunya ditandai dengan makin meningkatnya moral pada kehidupan bermasyarakat dari apa yang diterimanya selama pembelajaran baik formal, non formal, maupun informal. Perkembangan zaman dengan modernitasnya yang sebagian mengklaim sebagai kemajuan dalam segala bidang ternyata membutuhkan kajian ulang karena makin maraknya degradasi moral, akhlak, perilaku menyimpang, dll. Yang tidak sesuai dengan visi pendidikan secara hakiki, yaitu tercapainya nilai keluhuran budi pekerti (akhlakul karimah). Karena pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar-mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

Pendidikan adalah suatu kebutuhan pokok setiap manusia yang tidak dapat diganti dengan yang lain. Sehingga kegiatan ini menjadi keharusan untuk dilaksanakan oleh seseorang agar terbentuk menjadi pribadi yang berkualitas baik jasmani maupun rohani. Pendidikan juga mempunyai peran strategis dalam membentuk karakter anak didik menjadi manusia yang berkualitas, bukan dari sisi kognitif saja tetapi juga aspek spiritualis.

Sejalan dengan hal di atas, tujuan didirikannya SMK Tara Depok itu bukan hanya sekedar mampu di bidang kejuruan/keahlian khusus saja tetapi juga ingin menjadikan peserta didik berakhlakul karimah sesuai visi sekolah. Sekolah ini didirikan bukan di lingkungan pesantren atau sekolah agama, sekolah ini bernetabene sekolah kejuruan umum, namun di dalam kurikulumnya memasukkan mata pelajaran atau kegiatan-kegiatan Islam, seperti kajian Islam di waktu ramadhan (Sanlat, santri kilat) tentang kajian kitab ta'limul muta'allim pada bab *ta'dhiimul 'ilmi wa ahlihi*. Hal inilah yang ingin dicapai oleh sekolah ini, bukan kuantitas diutamakan tapi kualitas yang dibutuhkan, sehingga jumlah siswa yang tidak begitu banyak sekitar 80an dalam tiga kelas (X, XI, dan XII) bukan menjadi suatu penghambat untuk bersaing dengan

sekolah lainnya, karena akhlak yang diutamakan sebagai unggulan pada SMK Tara Depok.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka sekolah ini mempunyai prinsip tentang adanya korelasi antara seorang pelajar dengan seorang guru atau lingkungan sekolah harus terus terjaga dengan baik. Akhlak seorang murid terhadap gurunya harus terus diimplementasikan, Karen aguru adalah orang yang berilmu juga sumber ilmu. Salah satu kitab yang menerangkan tentang bagaimana seorang murid harus berperilaku dengan baik, ada terdapat dalam kitab ta'limul muta'allim karangan Imam azZanuji pada pasal ke empat; ta'dhiimul 'ilmi wa ahlihi (memuliakan ilmu pengetahuan –agama dan umum dan para ulama atau cendekiawan).

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan Penerapan Kitab Ta'limul Muta'allim: Ta'dhiimul 'Ilmi wa Ahlihi di SMK Tara Depok Cirebon.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan kitab Ta'limul Muta'allim: Ta'dhiimul 'Ilmi wa Ahlihi terhadap Perilaku Siswa SMK Tara Depok Cirebon?
2. Bagaimana Akhlak Siswa SMK Tara Depok Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tentang penerapan kitab Ta'limul Muta'allim: Ta'dhiimul 'Ilmi wa Ahlihi terhadap Perilaku Siswa SMK Tara Depok Cirebon.
- b. Untuk mengetahui tentang akhlak siswa SMK Tara Depok Cirebon.

2. Manfaat penelitian

- a. Bagi institusi. Penelitian ini dapat diarahkan sebagai pengembangan disiplin ilmu PAI.
- b. Bagi peneliti. Penelitian ini sebagai wujud tri dharma yang terus menerus dilakukan sebagai tanggungjawab professional sebagai dosen PTKIN.

- c. Bagi pengembangan ilmu. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti-peneliti lain sesudahnya khususnya dalam bidang penerapan kitab akhlak di sekolah umum yang bukan berbasis pesantren.

D. Penelitian Relevan

1. Penelitian Thesis Dewi Putri UIN Raden Fatah Palembang (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh sdr Dewi Putri UIN Raden Fatah Palembang (2018) mengangkat kitab Ta'lim Al-Muta'allim secara utuh semua bab yang ada dalam kitab tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika belajar dalam kitab Ta'limul Muta'allim antara lain niat belajar; memilih ilmu, guru dan teman; mengagungkan ilmu dan ahli ilmu; ketekunan, kontinuitas, dan minat; serta waktu belajar bagi penuntut ilmu. Disimpulkan bahwa, etika belajar dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim adalah tata cara dalam proses belajar yang bernilai sebaiknya penuntut ilmu melakukan hal tersebut untuk mendapatkan ilmu yang barokah, yakni ilmu yang memberi pengaruh pada perilaku siswa, dan mendatangkan perbedaan perilaku antara sebelum dan sesudah belajar.

Sedangkan yang dilakukan peneliti adalah bagian dari kitab Ta'limul Muta'allim yang berkisar pada bab mengagungkan ilmu dan ahli ilmu dengan objek Siswa SMK Tara Depok Cirebon.

2. Penelitian Anisa Nandya STAIN Salatiga (2013)

Tulisan yang berkaitan dengan tulisan peneliti adalah Penelitian Anisa Nandya STAIN Salatiga (2013) dengan judul Etika Murid Terhadap Guru (Analisis Kitab Ta'lim Muta 'allim Karangan Syaikh Az-Zarnuji). Anisa Nandya lebih mengangkat tentang etika murid terhadap guru. Dikatakan bahwa etika merupakan pilar utama dalam membangun sebuah tatanan kehidupan manusia. Seseorang tidak akan bisa selamat, sebuah pendidikan tidak akan bisa tegak dan kokoh, tanpa di topang oleh nilai-nilai etika yang baik dan mulia. Etika yang krisis pada zaman sekarang menyadarkan kita semua untuk berlomba-lomba dalam memperbaikinya, minimal dari diri sendiri.

Tentu ada perbedaan dengan Anisa Nandya, karena dalam penelitian ini bagian dari kitab Ta'limul Muta'allim yang berkisar pada bab mengagungkan ilmu dan ahli ilmu dengan objek Siswa SMK Tara Depok Cirebon.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang bertujuan menjadikan manusia yang potensial secara intelektual semata melalui transfer of knowledge yang kental, tetapi proses tersebut bermuara pada proses belajar. Pada kenyataannya pendidikan hanya menjadikan para penuntut ilmu menjadi manusia yang berpengetahuan tanpa diimbangi dengan etika, moral dan kepribadian yang baik. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Menurut UU SISDIKNAS no. 20 tahun 2003: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Didalam bahasa Arab pendidikan berasal dari kata *tarbiyah*, dengan kata kerja Rabba yang memiliki makna mendidik atau mengasuh. Bisa juga diartikan bimbingan oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani dan akal anak didik sehingga bisa terbentuk pribadi muslim yang baik.¹

B. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia

Berbicara pendidikan dan dinamikanya maka tidak terlepas dari kesejarahan. Oleh karena itu peneliti mengupas tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia.

Pendidikan Islam pada *fase pertama* diawali dengan masuknya Islam ke Indonesia pada abad 7 M/1 H yang disebarkan oleh pedagang dan muballigh dari Arab

¹ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pendidikan>, 01 Desember 2019 pukul 10.00 WIB.

di pantai barat Pulau Sumatera, tepatnya di daerah Baros.² Interaksi penyebaran Islam kepada penduduk lokal melalui kontak jual beli, perkawinan, dan dakwah baik secara individu maupun kolektif³ dari situlah semacam Pendidikan Islam berjalan meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana, tanpa terikat oleh formalitas waktu dan tempat tertentu. Materi pelajarannya yang pertama adalah kalimat Syahadat. Sebab barang siapa yang telah bersyahadat berarti sudah masuk Islam kemudian secara lambat laun dikembangkan pada materi rukun iman, rukun Islam terus berlanjut pada cara melaksanakan sholat lima waktu, membaca al-Qur'an dan seterusnya

Pada *fase kedua*, yakni masa pengembangan dengan proses adaptasi, pendidikan Islam terus berkembang. Mahmud Yunus menggambarkan pendidikan Islam pada fase ini ditandai dengan terbentuknya sistem langgar atau surau sebagai pusat studi keIslaman. Dengan dipandu oleh juru dakwah yang biasanya dikenal dengan sebutan *modin* atau *lebai*, pengajian al-Qur'an dibedakan menjadi dua tingkatan. Pertama, tingkat rendah atau pemula dengan materi pembelajaran pengenalan huruf dan bacaan al-Qur'an pada malam dan pagi hari sesudah shalat subuh. Kedua, tingkat atas, yaitu dengan penambahan beberapa pembelajaran seperti pelajaran lagu, qasidah, barzanji, dan tajwid. Metode yang digunakan ialah dengan cara *sorogan* dan *halaqah*⁴ Pada *fase ketiga* (munculnya kerajaan Islam) potret pendidikan di Indonesia mulai mengalami kemajuan karena pada fase ini pendidikan Islam mendapat dukungan yang penuh dari kerajaan, kerajaan Islam yang pertama adalah fase atau kerajaan Samudera di Aceh yang beridiri pada abad 10 M dengan rajanya yang pertama Al Malik Ibrahim bin Mahdum, yang kedua bernama Al Malik Al Shaleh dan yang terakhir Al Malik Sabar Syah. Sistem pendidikan Islam pada masa ini, sebagaimana keterangan Ibnu Batutah, sebagai berikut:

1. Materi pendidikan dan pengajaran agama bidang Syariat ialah Fiqh Madzhab Syafi'i.
2. Sistem pendidikannya secara informal berupa majlis taklim dan halaqah.
3. Tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh ulama.
4. Biaya pendidikan agama bersumber dari Negara.⁵

Kerajaan Islam yang kedua di Indonesia dan yang juga mewariskan pendidikan Islam adalah Perlak di Aceh. Raja yang pertama adalah Sultan Alaudin abad 12M, Raja yang keenam yang bernama Sultan Mahdum Alaudin Muhammad Amin adalah

² Zuhairini Mukhtarom, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 130

³ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1985), 14

⁴ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999), 22-23

⁵ Zuhairini Dkk, *Sejarah Pendidikan Islam...*, 212

seorang Ulama yang mendirikan perguruan tinggi Islam. Suatu majlis taklim tingkat tinggi yang dipruntukkan khusus para murid yang sudah alim. Kitab-Kitab yang dikaji cukup berbobot seperti Al-Um karya Imam Syafi'i dan beberapa kitab lainnya[7].

Pendidikan Islam pertama kali masuk ke Jawa pada abad 14 M (1399 M) di bawa oleh Maulana Malik Ibrahim bersama keponakannya yang bernama Mahdum Ishaq yang menetap di Gresik. Perkembangan Pendidikan Islam semakin kokoh dengan adanya pimpinan yang diebut Wali Songo. Sistem pendidikan yang dilakukan oleh para Wali adalah sistem pesantren. Maulana Malik Ibrahim berhasil mencetak kader mubaligh selama 20 tahun. Wali-wali yang lain adalah murid dari Maulana Malik Ibrahim yang akhirnya tersebar sampai ke Maluku, Kalimantan yang di bawa oleh para santri Wali songo[8]

Pada fase kedatangan orang barat (zaman penjajahan belanda) kondisi pendidikan Islam di Indonesia mengalami banyak kendala sehingga mengalami kemunduran yang luar biasa. Sejak zaman VOC, kedatangan Belanda ke Indonesia sudah bermotif Ekonomi, Politik, dan Agama. Pondok Pesantren, Masjid, Mushalla dianggap tidak membantu Belanda. Pesantren dianggap tidak berguna dan rendah sehingga disebut sekolah desa. Pada tahun 1882 M, Pemerintah Belanda membentuk satu badan khusus yang di beri nama *Priesterraden*. Badan ini bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam pribumi. Atas nasehat badan inilah maka pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang isinya orang yang memberikan pengajian harus mintak izin lebih dahulu. Pada tahun 1925, Belanda mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi bahwa tidak semua orang (kyai) boleh memberikan pelajaran mengaji. Pada tahun 1932 muncul lagi peraturan yang akan memberantas dan menutup madrasah atau sekolah yang tidak punya izin atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah

Wajah pendidikan Islam pada fase penjajahan Jepang mengalami sedikit kebaikan dibanding pada zaman Belanda walaupun secara umum terbengkalai karena murid-murid sekolah hanya disuruh gerak badan, baris berbaris, bekerja bakti, bernyanyi dan lain sebagainya. Yang masih agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang berada di pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah Jepang. Dalam rangka mencari simpati dan dukungan rakyat Indonesia, Jepang memberi beberapa kebaikan terhadap pendidikan Islam, antara lain sebagai berikut:

1. Pondok pesantren yang besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang
2. Sekolah negeri diberi pelajaran Budi Pekerti yang isinya identik dengan ajaran Agama
3. Memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahjar Muzakir, dan Bung Hatta[9]

Awal fase Indonesia merdeka ditandai dengan Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada awal masa ini kondisi Indonesia masih belum stabil, akan tetapi perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam cukup besar. Pendidikan agama saat itu secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Agama Islam secara umum mulai diatur pada bulan Desember 1946 melalui surat keputusan bersama dua Menteri, yaitu menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV sampai Kelas VI SR (Sekolah Rakyat)[10]

Pada fase pembangunan atau zaman Orde Baru, kehidupan sosial, agama, dan politik di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup baik. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam yang semakin mantap. Pemerintah Orde Baru betekad sepenuhnya untuk kembali kepada UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni. Pemerintah dan rakyat akan membina manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, yakni membina bidang jasmani dan rohani. Pendidikan agama makin memperoleh tempat yang kokoh dalam struktur organisasi pemerintahan dan masyarakat. Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN pada tahun 1973-1978 dan 1983 selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri maupun swasta di semua jenjang pendidikan[11].

Institusi Pendidikan Islam di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang majemuk, kaya dengan keaneka ragaman suku, budaya, bahasa, dan adat istiadatnya memiliki berbagai bentuk Institusi Pendidikan. Sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Institusi Pendidikan dikelompokkan menjadi tiga Kelompok, yaitu Pendidikan Islam Formal, Pendidikan Islam Non-Formal, dan Pendidikan Islam In-Formal.

1. Pendidikan Formal

Dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan dengan jelas bahwa “Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.[12] Abu Ahmad dan Nur Uhbiyato memberi pengertian tentang lembaga pendidikan sekolah, yaitu bila dalam pendidikan tersebut diadakan ditempat tertentu, teratur, sistematis, mempunyai perpanjangan dalam kurun waktu tertentu, berlangsung mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dan dilaksanakan berdasarkan aturan resmi.[13]

Haidar Nawawi mengelompokkan lembaga pendidikan sekolah kepada lembaga pendidikan yang kegiatan pendidikannya diselenggarakan secara sengaja, berencana,

sistematis dalam rangka membantu anak dalam mengembangkan potensinya agar mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di bumi.[14]

Di Indonesia yang termasuk kategori lembaga pendidikan formal adalah sebagai berikut:

- a. Raudhatul Athfal (RA) atau Bustanul Athfal, atau nama lain sesuai dengan pendiriannya
 - b. Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Islam (SDI)
 - c. Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI), atau nama lain yang setingkat dengan lembaga ini
 - d. Madrasah Aliyah (MA) atau Sekolah Menengah Atas Islam (SMAI) atau nama lain yang setingkat dengan lembaga ini
 - e. Perguruan Tinggi Islam antara lain adalah sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Universitas Islam Negeri (UIN) atau lembaga sejenis milik Yayasan atau organisasi keIslaman
2. Pendidikan Non Formal

Sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang[15]. Ramayulis mengartikan pendidikan Non-Formal adalah lembaga pendidikan yang teratur namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat.[16] Dengan kata lain dapat dipahami bahwa pendidikan Islam non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan tanpa mengikuti peraturan yang baku dari pemerintah.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tertuang dalam PP No. 55 tahun 2007 mengatur tentang pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada jenjang pendidikan formal, nonformal, dan informal. Di dalam PP No. 55 tahun 2007 menyebut majelis taklim, pengajian kitab, pendidikan Alquran dan diniyah taklimiyah sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam.

Beberapa diantara pendidikan Islam yang tidak formal diselenggarakan oleh masyarakat dan masih tetap eksis hingga sekarang adalah sebagai berikut :

- a. Masjid, Mushalla, Langgar, Surau dan Rangkang
 - b. Madrasah Diniyah
 - c. Majelis Ta'lim, TPQ, Taman Pendidikan Seni al-Qur'an, Jama'ah wirid
 - d. Kursus-kursus KeIslaman
 - e. Badan-badan Pembinaan Rohani
 - f. Badan-Badan Konsultasi keagamaan
3. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.[17]. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki pola-pola kepentingan masing-masing dalam mendidik anak yang belum ada di lingkungannya[18]. Pengertian ini berarti menegaskan bahwa yang masuk dalam kategori pendidid Islam in formal adalah pendidika Islam yang diberikan oleh orang tua kepada keluarganya dan juga pendidikan Islam dilingkungan masyarakat seperti majlis ta'lim yang ada di masjid-masjid atau mushola.

Praktek pendidikan Islam informal tidak terikat dengan penjenjangan, waktu, atau muatan kurikulumnya. Pendidikan berjalan secara alami dan materi pendidikannya bersifat kondisional dan sesuai dengan kebutuhan tanpa ada program waktu dan evaluasi.

C. Lembaga Pendidikan Islam

Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, acuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukann suatu usaha.[19] Istilah lembaga pendidikan Islam, secara terminologi ada banyak pendapat yang menjelaskan pengertiannya. Ada yang memaknai lembaga pendidikan Islam secara fisik dan ada yang mengartikannya secara abstrak. Sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr Ramayulis, Hasan Langgulung menjelaskan bahwa lembaga pendidikan adalah suatu sistem peraturan yang bersifat *mujarrad* suatu konsepsi yang terdiri dari Kode-kode, Norma-norma, Ideologi-ideologi dan sebagainya, baik tertulis atau tidak, termasuk perlengkapan material dan organisasi simbolik.[20] Pendapat Hasan Langgulung inilah pendapat yang mencakup keduanya (Fisik dan Non-fisik) dan cukup menggambarkan tentang realitas lembaga pendidikan Islam di Indonesia

Ada berbagai bentuk lembaga pendidikan Islam di Indonesia, antara lain adalah pondok pesantren dengan berbagai variannya, sekolah Islam atau Madrasah dengan berbagai jenjang dan modelnya, dan perguruan tinggi dengan berbagai program studinya.

1. Pondok Pesantren

Pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam yang pertama di Indonesia. Berdasarkan Pendataan DEPAG pada tahun 1984-1985, pondok pesantren tertua di Indonesia adalah pondok pesantren Jan Tampes II berdiri pada tahun 1062 di Pamekasan Madura[21]. Sekalipun kebenarannya masih diragukan tapi pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam Tertua di Indonesia.

Istilah pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Disamping itu kata Pondok mungkin berasal dari bahasa arab "*Funduq*" yang berarti Hotel Atau Asrama[22]. Sedangkan Pesantren menurut Mastuhu adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan

najaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari[23]

Pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam yang pertama di Indonesia. Keberadaan Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, telah tumbuh dan berkembang sejak masa penyebaran Islam dan telah banyak berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Sejarah perkembangan Pondok Pesantren menunjukkan bahwa lembaga ini tetap eksis dan konsisten menjalankan fungsinya sebagai pusat pengajaran ilmu-ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) sehingga dari pesantren lahir kader ulama, guru agama, mubaligh, tokoh politik dan lain-lain yang dibutuhkan masyarakat.

Pada sejarah berdirinya pesantren, awalnya pesantren didirikan dengan misi khusus, yaitu: *pertama*, sebagai wahana kaderisasi ulama' yang nantinya diharapkan mampu menyebarkan agama di tengah-tengah masyarakat; *kedua*, membentuk jiwa santri yang memiliki kualifikasi moral dan religius; *ketiga*, menanamkan kesadaran holistik bahwa belajar merupakan kewajiban dan pengabdian kepada tuhan, bukan hanya untuk meraih prestasi kehidupan dunia.[24] Kemampuan pesantren untuk tetap survive hingga kini tentu merupakan kebanggaan tersendiri bagi umat Islam, terutama kalangan pesantren. Hal ini sangat beralasan, sebab ditengah derasnya arus modern dan globalisasi, dunia pesantren masih konsis dengan *kitab kuning*[25] dan konsep pendidikan yang mungkin oleh sebagian orang dianggap tradisional. Begitu pula dengan pelajaran kitab-kitab kuning (klasik) merupakan salah satu elemen dasar dari tradisi pesantren. Seluruh sisi kehidupan pesantren bersifat religius-teosentris yang merujuk kepada al-Qur'an dan Hadis, sehingga semua aktivitas pendidikan dipandang sebagai ibadah kepada Tuhan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arus informasi global, pendidikan di pondok pesantren juga mengalami perubahan dalam rangka penyesuaian, khususnya menyangkut kurikulum dan metode serta teknik pembelajarannya. Aktifitas belajar bukan hanya diposisikan sebagai media (alat), tetapi sekaligus sebagai tujuan, karena itu proses belajar mengajar di pesantren sering tidak mengalami dinamika dan tidak mempertimbangkan waktu, strategi, dan metode yang lebih kontekstual dengan perkembangan zaman[26]. Padahal, seiring dengan pergeseran zaman santri membutuhkan formalitas, sebut saja Ijazah serta penguasaan bidang keahlian lain yang dapat mengantarnya agar mampu menjalani kehidupan. Di era modern, santri tidak cukup hanya berbekal nilai dan norma moral saja, tapi perlu pula dilengkapi dengan keahlian yang relevan dengan dunia kerja modern.

Hal demikian inilah yang kemudian mengharuskan pendidikan di Pondok Pesantren mengalami perubahan dan pengembangan khususnya kurikulum dan metode

pembelajarannya. Sejak tahun 1970-an bentuk-bentuk pendidikan yang diselenggarakan di pesantren sudah sangat bervariasi. Bentuk-bentuk pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe, yakni:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan (MI, MTs, MA, dan PT. Agama Islam) maupun yang juga memiliki sekolah umum (SD, SMP, SMA, dan PT Umum).
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional.
- c. Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyah.
- d. Pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian.[\[27\]](#)

Pesantren jenis yang ketiga dan keempat ini masih mempertahankan pola pendidikan khas pesantren yang telah lama berlaku di pesantren, baik kurikulum atau metode pembelajarannya, sehingga disebut Pondok Pesantren *Salafiyah*. Berbeda dengan Pondok pesantren jenis pertama, Pesantren ini tidak menggunakan kurikulum pemerintah dan hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan mengkaji kitab-kitab klasik atau yang disebut *kitab Kuning*. Metode pembelajarannya pun menggunakan metode khas pesantren tradisional yaitu *sorogan*, *bandongan* dan *halaqoh*.[\[28\]](#) Kebanyakan santrinya belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dasar, sehingga keluaran/lulusan Pesantren Salafiyah tersebut tidak mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijazah sebagaimana lulusan pendidikan formal yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk memenuhi tuntutan pekerjaan.

Berdasarkan Pendataan pada tahun 2011/2012 Jumlah pondok pesantren di Indonesia mencapai 27.230 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia Populasi Pondok Pesantren terbesar berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten yang berjumlah 78,60% dari jumlah seluruh Pondok Pesantren di Indonesia. Dengan rincian Jawa Barat 7.624 (28,00%), Jawa Timur 6.003 (22,05%), Jawa Tengah 4.276 (15,70%), dan Banten 3.500 (12,85%). Dari seluruh Pondok Pesantren yang ada, berdasarkan tipologi Pondok Pesantren, terdapat sebanyak 14.459 (53,10%) Pondok Pesantren Salafiyah, dan 7.727 (28,38%) Khalafiyah/Ashriyah, serta 5.044 (18,52%) sebagai Pondok Pesantren Kombinasi[\[29\]](#)

2. Sekolah Islam

Sekolah Islam merupakan bentuk dari modernisasi pendidikan Islam. Awal munculnya Sekolah Islam berawal dari adanya sekelompok masyarakat yang berlatar belakang agama yang mempuntai gagasan membuka sekolah dengan sistem “sekolah belanda” dengan tambahan pelajaran Agama. Pemrakarsa Utama dalam modernisasi Pendidikan Islam adalah organisasi modernis Islam seperti Jami’at Khair, Al-Irsyad, dan Muhammadiyah.[\[30\]](#)

Dalam perkembangannya, pendirian pendidikan Islam ini menjadi inspirasi bagi hampir semua organisasi pergerakan Islam seperti Nahdhotul Ulama’ (NU) dengan Pendidikan Maarif tahun 1926 di Jawa timur, Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUI), Al-Washliyah, Matalaul Anwar, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dengan corak dan ciri khas masing-masing. Sekolah yang mereka dirikan merupakan sekolah umum dengan memasukkan pengajaran Agama dan menambahkan nama Islam di belakangnya sehingga

menjadi SD Islam, SMP Islam, dan SMA Islam. Selain itu, ada yang menggunakan nama organisasi penyelenggara seperti SD Muhammadiyah, SMP Maarif NU, SMA Al-Irsyad. Ada pula yang menggunakan perlambang berbahasa Arab, misalnya SD Al-Falah, SMP Futuhiyah. Dan belakangan ini muncul nama SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) SMPIT (Sekolah Menengah Pertama Islam terpadu).[31] Belakangan ini muncul sekolah Islam dengan model *fullday* atau *Boarding Scholl*.

Perkembangan Sekolah Islam saat ini mendapat Animo dari masyarakat yang cukup besar. Hal ini terjadi sebagai imbas dari kekurangan yang ada pada Madrasah atau Sekolah. Banyak masyarakat menilai bahwa pendidikan di madrasah kurang profesional dalam bidang materi umum sehingga tertinggal dengan sekolah, sementara sekolah umum kurang dalam memberikan layanan pendidikan Agama. Sekolah Islam muncul sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pendidikan Agama yang baik dan pendidikan umum yang profesional.

3. Perguruan Tinggi Islam

Pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam sudah dirintis sejak zaman pemerintahan **Hindia Belanda**, dimana Dr. Satiman Wirjosandjoyo pernah mengemukakan pentingnya keberadaan lembaga pendidikan tinggi Islam untuk mengangkat harga diri kaum muslim di Hindia Belanda yang terjajah itu. Bagi Indonesia, kebutuhan Pendidikan tinggi Islam sudah sangat mendesak untuk mendidik tenaga ahli dalam bidang Ilmu agama Islam dan sebagai pusat pengembangan intelektualisme agama Islam. Keinginan tersebut berhasil direalisasi di Minangkabau dengan didirikannya sekolah Tinggi oleh persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI) di Padang yang diresmikan pada tanggal 9 Desember 1940[32]. Sekolah Tinggi Islam ini merupakan Sekolah Tinggi Islam yang pertama kali berdiri di Indonesia dan menjadi cikal bakal Sekolah Tinggi Islam yang lain baik negeri maupun swasta.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 19 ayat 1 menyatakan “Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi”. dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perguruan tinggi Islam adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah (SMA/MA) yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang berciri khas Islam.

Saat ini Pendidikan Tinggi Islam (PTI) di Indonesia baik yang negeri maupun yang swasta terus berkembang dengan berbagai program studi dan jurusan. Saat ini Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia berjumlah 272 lembaga sementara Perguruan Tinggi Islam Negeri berjumlah 52.

D. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam di Indonesia

Sistem adalah suatu gagasan atau prinsip yang bertautan yang tergabung menjadi suatu keseluruhan[33]. Dengan demikian Sistem pendidikan bisa difahami sebagai himpunan gagasan atau prinsip-prinsip pendidikan yang saling bertautan yang tergabung menjadi suatu keseluruhan[34].

Dalam mengkaji sistem pendidikan dalam suatu negara tidak terlepas dari falsafah suatu bangsa tersebut. Ketika negar-negara barat mempunyai falsafah hidup rasionalis, materialis, dan pragmatis maka sistem pendidikan yang dibuat oleh barat tentu bercorak rasionalis, pragmatis, dan materialis. Falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila. Dengan demikian maka sistem pendidikan Nasional Indonesia (Pendidikan Islam) bercorak khusus Indonesia yang tidak ditemui pada sistem pendidikan lainnya. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[35]

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Indonesia sudah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang SISDIKNAS kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah lalu dioprasionalkan dalam Peraturan Menteri. Pendidikan Islam merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Islam sehingga sistemnya mengikuti Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan keagamaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Bab I, Pasal 1, Ayat 2 berbunyi, “pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan / atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya”.

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam In-Formal dan Non-formal memang disebut dalam Peraturan Pemerintah akan tetapi dalam pelaksanaannya berjalan secara alami tanpa terikat dengan peraturan yang baku dan diselenggarakan sesuai dengan situasi, kondisi dan tujuan penyelenggaraannya.

Adapun sistem penyelenggaran pendidikan Islam formal di Indonesia sebagai bagian dari pendidikan nasional tentu tidak terlepas dari Sistem Pendidikan Nasional. Penyelenggaraan Pendidikan Islam mengacu pada delapan Standar pendidikan nasional yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32. tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)

1. Tujuan Pendidikan Islam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Tujuan Pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional maka tujuan pendidikannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

C. Akhlak

Secara etimologi (lughotan) akhlak (bahasa arab) adalah bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Berarti dari kata *khalaqa* yang berarti menciptakan. Seakar dengan kata *khaliq* (yang menciptakan), makhluk (yang diciptakan) dan *khalaq* (penciptaan). Kesamaan akar kata di atas mengisyaratkan dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak *khalaq* (penciptaan) dengan perilaku makhluk (manusia). Atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya baru mengandung nilai akhlak yang hakiki manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kehendak *khaliq* (Tuhan).⁶

⁶ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengalaman Islam, 1999), hlm. 1.

Para Ulama ilmu akhlak merumuskan definisinya dengan berbeda-beda tinjauan yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:⁷

1. Menurut al-Qurtubi

“Suatu perbuatan manusia yang bersumber dari adabkesopanannya disebut akhlak, karena perbuatan itu termasuk bagian dari kejadiannya”.

2. Menurut Ibn Maskawaih

“Akhlak adalah keadaan jiwa yang selalu mendorong manusia berbuat, tanpa memikirkannya lebih lama”.

3. Menurut Imam al-Ghazali:

“Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”.

4. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy

“Akhlak adalah bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia, yang menimbulkan perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela dengan cara yang disengaja”.

Dapat diketahui bahwa akhlak adalah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwa dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik, disebut dengan akhlak mulia, atau perbuatan buruk, disebut dengan akhlak tercela sesuai dengan pembinaannya. Jadi pada hakikatnya khulq (budi pekerti) atau akhlak ialah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa yang menjadi kepribadian hingga dari situ timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran.

D. Ta’dhiimul ‘Ilmi wa Ahlihi

BAB III METODE PENELITIAN

⁷ Mahjuddin, *Kuliah Akhlak-Tasawuf*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), hlm. 2-4.

Pada hakikatnya metode penelitian digunakan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Sementara itu, dilihat dari teknik penyajian datanya, penelitian menggunakan pola deskriptif. Yang dimaksud pola deskriptif menurut Best (sebagaimana dikutip oleh Sukardi), adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian serta pemahaman secara mendalam dari individu, kelompok atau situasi pada suatu sistem yang terbatas.⁹

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bentuk data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh peneliti.¹⁰ Data tersebut diperoleh dari SMK TARA DEPOK Cirebon, Guru-guru dan para siswa SMK TARA DEPOK Cirebon.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer. Data sekunder berasal dari kepustakaan. Data ini berupa dokumen, buku, majalah, jurnal, website resmi dan lain sebagainya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 157.

⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 20.

¹⁰ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 24.

